Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 218 - 224

Evaluasi Strategi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nabire dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Tanah

Agus Tinting Karurung[1*], Yoel Pasae[2], Sita Y. Sabandar[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
agustintingk@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Nabire menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nabire dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap enam informan kunci, meliputi pejabat pemerintah, agen distribusi, dan masyarakat pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran strategis Bagian Perekonomian Setda diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, penetapan kuota distribusi, pembatasan pembelian, serta pengawasan terhadap agen dan pangkalan resmi. Namun, implementasi strategi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur distribusi yang kurang memadai, akurasi data penerima subsidi yang rendah, serta praktik penyelewengan oleh pengecer tidak resmi. Meskipun strategi yang diterapkan sudah menunjukkan arah positif, efektivitasnya belum merata di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, digitalisasi sistem pengawasan distribusi, serta evaluasi kebijakan berbasis data agar distribusi minyak tanah dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: strategi, distribusi energi, minyak tanah, evaluasi kebijakan, Kabupaten Nabire

Abstract

The shortage of kerosene in Nabire Regency has generated significant socio-economic impacts, particularly for low-income households that remain highly dependent on this energy source. This study aims to evaluate the strategies implemented by the Economic Affairs Division of the Regional Secretariat (Setda) of Nabire Regency in addressing the issue. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis involving six key informants, including government officials, distribution agents, and beneficiary households. The findings reveal that Setda's strategic roles are manifested through cross-sectoral coordination, quota allocation, purchase restrictions, and monitoring of official agents and retailers. However, the implementation of these strategies encounters persistent challenges, such as limited human resources, inadequate distribution infrastructure, inaccurate beneficiary data, and illicit practices by informal vendors. Although the adopted strategies have produced partial improvements, their effectiveness remains uneven, especially in remote areas. Strengthened institutional coordination, digital-based monitoring systems, and continuous data-driven policy evaluation are therefore required to ensure a fair, transparent, and sustainable distribution of kerosene across Nabire Regency.

Keywords: *strategy, energy distribution, kerosene, policy evaluation, Nabire Regency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kelangkaan minyak tanah masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia hingga saat ini. Di Kabupaten Agats (Provinsi Papua Selatan), kelangkaan yang berlangsung sepanjang Juli 2025 menyebabkan antrean panjang bahkan hingga menghambat operasional usaha kecil—seperti warung makan yang tidak bisa dibuka karena ketiadaan minyak tanah (RRI, 2025). Harga pun melambung drastis dari Rp6.000 hingga Rp20.000 per liter (Pemerintah Kabupaten Asmat, 2025) (RRI, 2025). Demikian pula, di Kabupaten Sikka (NTT), harga minyak tanah menembus di atas HET (Rp10.000–12.000/L vs. HET sekitar Rp6.000/L), akibat kelangkaan di pangkalan dan penjualan di atas HET oleh oknum tidak bertanggung jawab (Tirto.id, 2022).

Temuan serupa terjadi di Medan—antrean panjang dan harga hingga Rp3.500 per liter, jauh lebih tinggi dari HET (Rp2.250 per liter), diduga karena praktik penyaluran yang menyimpang (Liputan6.com, 2005).

Tabel 1. Kondisi Kelangkaan dan Harga Minyak Tanah di Beberapa Wilayah Indonesia (2022–2025)

Wilayah	Periode	Harga (Rp/L)	Kondisi dan Penyebab
Agats, Asmat	Juli 2025	15.000–20.000	Antrean panjang, usaha tak bisa berjalan, pasokan terbatas
Sikka, NTT	2022	10.000–12.000	Kelangkaan, penjualan di atas HET oleh oknum tidak resmi
Medan, Sumut	2005	3.000–3.500	Harga di atas HET (Rp2.250), penyimpangan distribusi

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi minyak tanah subsidi, mulai dari ketidakadilan akses, distorsi harga, hingga penyimpangan distribusi yang mengakibatkan beban sosial-ekonomi bagi masyarakat rentan. Hal ini mendesak pentingnya evaluasi strategi distribusi yang efektif dalam konteks pemerintahan daerah.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena meski kebijakan subsidi dan mekanisme kuota telah diterapkan, kenyataan di lapangan menunjukan distorsi distribusi yang merugikan masyarakat—terutama rumah tangga berpenghasilan rendah. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang diterapkan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) dalam menangani distribusi minyak tanah di wilayah terpencil seperti Kabupaten Nabire sangat mendesak. Hasil penelitian ini berpotensi memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan utama berikut: **Bagaimana efektivitas strategi yang diterapkan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nabire dalam mengatasi kelangkaan minyak tanah bersubsidi, serta hambatan apa saja yang mengganggu pelaksanaannya, dan bagaimana strategi tersebut dapat ditingkatkan agar distribusi berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan?**

TINJAUAN LITERATUR

Minyak Tanah sebagai Kebutuhan Energi

Minyak tanah masih menjadi sumber energi utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan gas dan listrik. Di Indonesia, minyak tanah digunakan terutama untuk memasak dan penerangan rumah tangga (Direktorat Jenderal Migas, 2022). Meskipun pemerintah mendorong program konversi ke LPG, ketergantungan terhadap minyak tanah masih tinggi di wilayah timur Indonesia (Sukarna, 2021).

Kelangkaan minyak tanah dapat menimbulkan keresahan sosial, kenaikan harga, dan peningkatan ketergantungan masyarakat pada pasar gelap (Suci, 2024). Dalam konteks ekonomi rumah tangga, kelangkaan bahan bakar ini berdampak langsung pada meningkatnya beban pengeluaran dan penurunan daya beli (Widiyanti, 2023).

Konsep Peran Strategis Pemerintah Daerah

Peran strategis pemerintah daerah, khususnya Bagian Perekonomian Setda, mencakup fungsi koordinasi lintas sektor, perencanaan distribusi energi, dan pengawasan kebijakan (Yani, 2020). Mintzberg menegaskan bahwa peran strategis organisasi, termasuk lembaga publik, tidak hanya reaktif tetapi harus proaktif dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat (Mintzberg, 2017).

Dalam konteks kebijakan energi, pemerintah daerah berperan penting dalam

menjaga distribusi minyak tanah agar tetap adil dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan energi sesuai kebutuhan wilayah (Republik Indonesia, 2014).

Kebijakan Distribusi Energi dan Subsidi

Kebijakan subsidi minyak tanah bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, efektivitas kebijakan seringkali terkendala oleh lemahnya sistem distribusi dan pengawasan (Alamsyah, 2020). Program konversi minyak tanah ke LPG yang dijalankan secara nasional juga belum menjangkau wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga masyarakat masih sangat bergantung pada minyak tanah (Pramono & Gunanto, 2016).

Studi terbaru menunjukkan bahwa kelemahan dalam pendataan penerima manfaat subsidi dan keterbatasan infrastruktur distribusi menyebabkan ketidakadilan akses energi (Sitorus, 2019). Oleh karena itu, kebijakan berbasis data dan sistem digitalisasi distribusi diperlukan untuk meminimalisasi penyimpangan (Miles & Huberman, 2014; Suci, 2024).

Faktor Pendukung dan Hambatan Distribusi

Beberapa faktor mendukung keberhasilan distribusi minyak tanah, antara lain koordinasi antar instansi, adanya agen resmi, dan regulasi kuota wilayah (Yani, 2020). Namun, hambatan distribusi sering muncul dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis sulit, serta lemahnya pengawasan di lapangan (Damayanti, Rahmawati, & Dwi, 2022).

Praktik penimbunan dan penjualan minyak tanah di atas harga eceran tertinggi (HET) juga memperburuk kelangkaan dan merugikan konsumen (Zulfikar & Sudiarto, 2023). Dengan demikian, efektivitas distribusi energi sangat ditentukan oleh kombinasi regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang transparan, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk memahami fenomena kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Nabire secara mendalam melalui eksplorasi peran strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman dari para informan secara kontekstual, serta memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika kebijakan distribusi energi di tingkat daerah (Creswell & Poth, 2018).

Desain penelitian ini bersifat **studi kasus**, dengan fokus pada satu lokasi penelitian yaitu Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai strategi pemerintah daerah dalam menghadapi kelangkaan energi, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Yin (2018) bahwa studi kasus merupakan metode yang tepat untuk menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas.

Populasi penelitian adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam distribusi minyak tanah di Kabupaten Nabire, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Karena penelitian kualitatif tidak mengutamakan jumlah responden tetapi kedalaman data, maka peneliti menggunakan teknik **purposive sampling** untuk memilih informan yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan memadai terkait topik penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Informan penelitian terdiri dari enam orang, yaitu pejabat Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Nabire, pejabat Dinas Perdagangan, agen distribusi minyak tanah, serta tiga orang masyarakat pengguna minyak tanah di wilayah perkotaan dan pedalaman.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Nabire karena wilayah ini masih menghadapi ketergantungan tinggi pada minyak tanah sebagai sumber energi rumah tangga, sementara program konversi ke LPG belum merata. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli–Agustus 2025. Pemilihan waktu tersebut dianggap relevan karena pada periode tersebut masyarakat masih menghadapi kelangkaan minyak tanah yang berdampak langsung pada kehidupan sosial-ekonomi sehari-hari.

Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama, yaitu **wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi**. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai strategi distribusi, peran pemerintah daerah, serta hambatan implementasi kebijakan.

Observasi dilakukan di pangkalan minyak tanah dan lokasi distribusi untuk melihat kondisi nyata di lapangan, sementara studi dokumentasi mencakup analisis regulasi, laporan resmi, serta arsip distribusi energi daerah. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas temuan, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang diperoleh (Flick, 2018).

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan **model analisis data interaktif Miles dan Huberman** yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). Proses ini dilakukan secara siklus berulang hingga data mencapai titik jenuh. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan memperhatikan keterkaitan antar kategori data, serta diverifikasi melalui pengecekan ulang dengan informan (member check).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri atas enam informan yang dipilih secara purposive karena keterlibatannya langsung dalam distribusi dan penggunaan minyak tanah di Kabupaten Nabire. Informan meliputi pejabat pemerintah daerah, agen distribusi, serta masyarakat pengguna di wilayah perkotaan dan pedalaman.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Kode Informan	Nama (Inisial)	Jabatan/Status	Peran dalam Penelitian
I1	Y. A.	Kepala Dinas Perdagangan	Penentu kebijakan distribusi dan pengawasan
I2	T.	Ibu rumah tangga (perkotaan)	Pengguna langsung minyak tanah
I3	A.	Ibu rumah tangga (pedalaman)	Pengguna langsung minyak tanah di pinggiran
I4	M. S.	Agen Minyak Tanah	Penyalur dari Pertamina ke pangkalan
I5	F.	Ibu rumah tangga (padat penduduk)	Pengguna langsung minyak tanah
I6	M. S. (P)	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Koordinator strategis penanganan kelangkaan

Sumber: Data primer (2025)

Temuan Wawancara

Hasil wawancara dengan keenam informan menunjukkan bahwa strategi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nabire mencakup koordinasi lintas instansi, penetapan kuota distribusi, pembatasan pembelian, serta pengawasan melalui agen dan pangkalan resmi. Namun, ditemukan pula sejumlah hambatan seperti keterbatasan SDM pengawas, infrastruktur distribusi yang kurang memadai, serta praktik penimbunan oleh pengecer tidak resmi.

Tabel 3. Ringkasan Kutipan Wawancara Informan

Fokus Pertanyaan	Kutipan Responden	Analisis Singkat
Peran strategis Setda	"Setda berperan sebagai koordinator lintas sektor dan penentu kuota distribusi." (I1)	Menunjukkan fungsi koordinatif dalam pengelolaan energi
Strategi distribusi	"Kuota ditentukan berdasarkan data kebutuhan distrik dan laporan agen." (I6)	Kebijakan berbasis data meski belum sepenuhnya akurat
Kebijakan pembatasan pembelian	"Kadang ada batasan 10 liter per orang, tapi penerapannya tidak konsisten." (I2)	Implementasi kebijakan belum berjalan merata
Hambatan distribusi	"Wilayah pelosok sulit dijangkau, akses jalan terbatas, pasokan sering terlambat." (I4)	Faktor geografis menjadi kendala signifikan
Dampak kelangkaan bagi masyarakat	"Kalau stok habis, kami terpaksa beli di pengecer dengan harga lebih mahal." (I3)	Beban ekonomi meningkat di tingkat rumah tangga
Solusi ke depan	"Kami sedang mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital untuk distribusi." (I6)	Rencana inovasi untuk efektivitas pengawasan

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah utama:

1. **Peran strategis Bagian Perekonomian Setda**
   Bagian Perekonomian Setda berfungsi sebagai koordinator kebijakan lintas sektor dengan tugas utama mengusulkan kuota minyak tanah, memimpin rapat koordinasi bersama Pertamina dan Dinas Perdagangan, serta mengawasi distribusi. Temuan ini sejalan dengan teori Mintzberg (2017) tentang peran strategis organisasi yang menuntut perencanaan, pengambilan keputusan, dan koordinasi sumber daya.
2. **Strategi dan kebijakan distribusi**
   Strategi utama mencakup pembatasan volume pembelian, penetapan kuota berbasis zonasi, serta pengawasan melalui tim gabungan. Namun, implementasi kebijakan belum optimal karena keterbatasan data kebutuhan riil dan lemahnya pengawasan di lapangan. Hal ini konsisten dengan temuan Sitorus (2019) yang menekankan pentingnya sistem distribusi berbasis data untuk menghindari distorsi.
3. **Hambatan pengawasan distribusi**
   Hambatan utama mencakup keterbatasan SDM pengawas, kondisi geografis sulit, dan praktik penimbunan oleh pengecer tidak resmi. Masyarakat di wilayah pedalaman masih mengalami kesenjangan akses dibandingkan masyarakat perkotaan. Temuan ini mendukung studi Sukarna (2021) yang menyebutkan bahwa distribusi energi di Indonesia Timur terkendala infrastruktur dan logistik.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nabire bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis sistem data terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan kebijakan distribusi belum menjawab kebutuhan masyarakat di semua wilayah. Sebagaimana diungkapkan oleh Creswell & Poth (2018), pendekatan berbasis data sangat penting dalam pengambilan kebijakan publik agar implementasi lebih efektif dan terukur.

Dari perspektif masyarakat, kelangkaan minyak tanah bukan hanya persoalan ekonomi tetapi juga persoalan sosial, karena mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Untuk itu, penelitian ini menekankan perlunya inovasi kebijakan melalui digitalisasi sistem pengawasan distribusi dan pelibatan masyarakat dalam kontrol sosial, sejalan dengan rekomendasi Widiyanti (2023) tentang partisipasi masyarakat dalam menjaga transparansi distribusi bahan pokok.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran strategis pemerintah daerah dalam distribusi energi sangat ditentukan oleh **koordinasi lintas instansi, keakuratan data penerima manfaat, serta sistem pengawasan yang transparan dan adaptif**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nabire memiliki peran strategis dalam mengatasi kelangkaan minyak tanah melalui fungsi koordinatif lintas instansi, penetapan kuota distribusi, serta pengawasan jalur distribusi energi. Strategi yang diterapkan meliputi pembatasan pembelian, zonasi distribusi, serta pembentukan tim pengawas. Namun, efektivitas strategi tersebut masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur distribusi yang tidak memadai, rendahnya akurasi data kebutuhan masyarakat, serta lemahnya pengawasan di lapangan.

Dampak dari kelemahan strategi tersebut adalah distribusi minyak tanah yang belum merata, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga masyarakat masih harus membeli dengan harga lebih mahal di pengecer tidak resmi. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah dijalankan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan strategi di tingkat pemerintah daerah dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan koordinasi lintas instansi** melalui forum rutin antara Bagian Perekonomian, Dinas Perdagangan, Pertamina, agen distribusi, dan aparat

keamanan agar sistem distribusi lebih responsif terhadap gejala kelangkaan.

2. **Pengembangan sistem distribusi berbasis digital** yang memuat data penerima manfaat, pemantauan stok, serta pelaporan distribusi secara real-time, sehingga kebijakan berbasis data dapat terwujud.
3. **Peningkatan kapasitas pengawasan lapangan** dengan menambah jumlah petugas, menyediakan sarana transportasi ke daerah terpencil, dan memperkuat peran aparat di tingkat kampung atau kelurahan dalam memantau distribusi.
4. **Penyesuaian kebijakan distribusi minyak tanah** dengan memperhatikan data kebutuhan riil masyarakat, termasuk mekanisme distribusi cadangan darurat untuk daerah sulit akses.
5. **Peningkatan partisipasi masyarakat** melalui edukasi dan sosialisasi terkait hak memperoleh minyak tanah subsidi serta mekanisme pelaporan jika terjadi penyelewengan distribusi.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada jumlah informan yang relatif kecil dan hanya berfokus pada satu kabupaten, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas ke daerah lain di Papua maupun Indonesia Timur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden dari berbagai lapisan masyarakat serta membandingkan efektivitas strategi distribusi di beberapa daerah yang menghadapi persoalan serupa. Selain itu, penelitian kuantitatif berbasis data konsumsi dan harga riil dapat digunakan untuk memperkuat analisis mengenai efektivitas kebijakan distribusi energi bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, R. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Damayanti, A., Rahmawati, S., & Dwi, P. (2022). Pengaruh kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng bagi para pedagang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Universitas Negeri Semarang.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2022). *Laporan Tahunan Distribusi BBM Subsidi di Papua Tengah*. Jakarta: Kementerian ESDM.

Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). London: Sage.

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865

Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *2*(1), 45–51. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mintzberg, H. (2017). *Managing the Myths of Health Care*. Oakland, CA: Berrett-Koehler.

Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 8–13. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295

Pramono, J., & Gunanto, G. (2016). Dampak program konversi minyak tanah ke LPG terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi (studi kasus di Pangkalan Kota Salatiga). *Among Makarti, 2*(2), 123–136.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Roreng, P. P., Halik, J. B., Halik, M. Y., & Irdawati. (2024). Systematic Literature Review : Kondisi Makroekonomi

Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Prospek di Masa Mendatang. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 56–67. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.306

Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 22–28. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300

Sitorus, H. (2019). Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kelangkaan BBM: Studi di Kabupaten Lahat. *Jurnal Administrasi Publik, 14*(2), 123–134.

Suci, N. W. (2024). Kelangkaan minyak bumi yang dapat menghambat jalannya perekonomian masyarakat di Daerah Jawa Timur. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 13*(2), 93–104.

Sukarna, A. (2021). Evaluasi distribusi minyak tanah bersubsidi di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 10*(1), 45–56.

Susilowati, D., Lambe, K. H. P., & Farid, M. (2023). Investigating the parameters which influence green supply chain management in agricultural industry. *ECONOMIC ANNALS-XXI*, *206*(11–12), 30–35. https://doi.org/10.21003/ea.v206-05

Tandibua, S. T., Pasae, Y., & Baharuddin. (2025). Analisis Kinerja Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 1–7. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.294

Widiyanti, S. (2023). Analisis faktor kelangkaan minyak goreng sawit terhadap kesejahteraan rakyat dalam implementasi kedaulatan rakyat. *Sovereignty, 2*(3), 241–252.

Yani, E. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Energi Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Zulfikar, M., & Sudiarto. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan minyak tanah di luar harga eceran tertinggi. *Jurnal Ilmiah Hukum, 5*(1), 55–66.